HARIAN UMUM
NusaBali

Adi Arnawa Diperiksa Jaksa

★ Terkait Kasus PHR Badung

DENPASAR, NusaBali

Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Kadispenda) Badung, Wayan Adi Arnawa, diperiksa penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali di Denpasar, Senin (25/5) siang. Kadispenda Adi Arnawa diperiksa penyidik kejaksaan terkait kasus dugaan penyimpangan pembagian Pajak Hotel dan Restoran (PHR) Badung ke Kabupaten/Kota se-Bali.

Adi Arnawa datang memenuhi panggilan ke Kan-

Bersambung ke Hal-15 Kolom 1

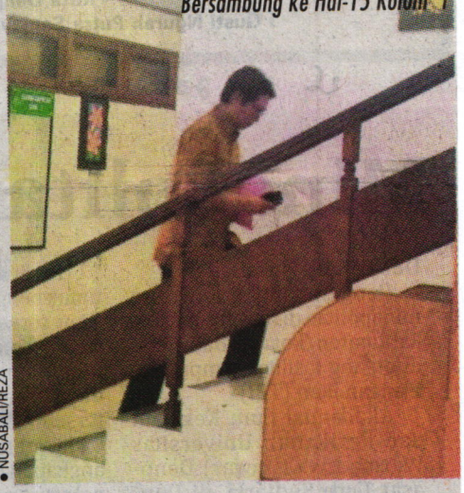

• NUSABALI/REZA

Kadispenda Badung, Wayan Adi Arnawa saat naik ke Lantai II Kejati Bali, Senin (25/5).

Adi Arnawa Diperiksa Jaksa

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

tor Kejati Bali, Niti Mandala Denpasar, Senin siang sekitar 11.45 Wita. Adi Arnawa yang datang dengan didampingi sopirnya, langsung menjalani pemeriksaan di Lantai II Kantor Kejati Bali.

Setelah diperiksa selama hampir 2 jam, Adi Arnawa yang kandidat Calon Bupati Badung di internal PDIP untuk Pilkada 2015, keluar ruangan pemeriksaan Kejati Bali sekitar pukul 13.30 Wita. Wartawan yang menunggunya di lantai bawah pun dibuat terkecoh, karena Adi Arnawa langsung naik ke mobil yang sudah menunggunya.

Ketika dihubungi NusaBali per telepon, Adi Arnawa yang masih berada di dalam mobil dalam perjalanan ke Badung, membenarkan kedatangannya ke Kantor Kejati Bali terkait masalah PHR. Namun, menurut Adi Arnawa, dirinya datang hanya untuk memberikan data dan dokumen terakait penerimaan PHR Badung. "Saya hanya memberikan data dan dokumen soal PHR Badung," jelas Adi Arnawa.

Namun, saat ditanya soal pembagian PHR Badung ke Kabupaten/Kota se-Bali yang diduga bermasalah, Adi Arnawa mengatakan tidak tahu menahu. Soalnya, hai ini berada di Bagian Keuangan Pemkab Badung. "Saya tidak tahu, karena hal itu di Bagian Keuangan. Terimakasih," ujar birokrat asal Kuta Selatan, Badung ini.

Sementara itu, salah seorang penyidik Kejati Bali yang ditemui NusaBali mengatakan, selain memberikan data dan dokumen soal PHR Badung, kedatangan Adi Arnawa kemarin juga untuk diperiksa. Adi Arnawa sempat ditanyai soal pembagian PHR Badung ke Kabupaten/Kota se-Bali. "Ya, tadi sempat ditanya soal PHR itu," ujar penyidik kejaksaan yang enggan disebutkan namanya ini.

Kasus PHR itu sendiri muncul berawal dari kicauan anggota DPRD Badung, Nyoman Sentana. Dia mengatakan ada penyimpangan dalam pembagian PHR Badung ke Kabupaten/Kota se-Bali. Pembagian PHR disebutkan tidak sesuai dengan peruntukan.

Masalahnya, kata Sentana, PHR yang seharusnya digunakan untuk mendukung pariwisata, justru digunakan buat kepentingan lain. Menurut dia, pembagian di luar peruntukan ini jelas penyimpangan. Hal itu juga tidak sesuai dengan surat kesepakatan bersama di luar Perda, bahwa dana bagi hasil hanya untuk pariwisata.

Mengenai jumlah nominal pembagian dana yang didapat dari PHR Badung tersebut, masih didalami. Karena, ada dugaan selesih dalam pelaporan dalam pertanggungjawaban di APBD Badung 2014. Menurut Sentana, besaran nominal yang disebutkan dibagi sekitar Rp 260 miliar lebih. Ada dugaan selisih mencapai Rp 41 miliar. Sentana sendiri sudah sempat diperiksa penyidik Kejati Bali terkait masalah ini, 4 Mei 2015 lalu. **rez**

Edisi : Selasa, 26 Mei 2015

Hal :

HARIAN UMUM NusaBali

Dua Pejabat Teknis Setwan Diperiksa

★ Dugaan Penyelewengan Perjalanan Dinas Pemkot Denpasar

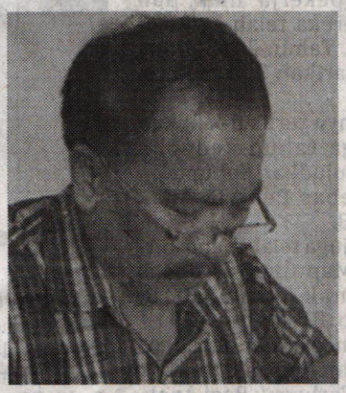

I Gusti Made Patra

• NUSABALI/HENDRA

Gede Wira Kusuma

DENPASAR, NusaBali

Dua pejabat teknis Sekretariat DPRD (Setwan) Kota Denpasar, yaitu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Perjalanan Dinas (Perdin), I Gusti Made Patra dan mantan Kasubag Antarlembaga, Gede Wira Kusuma diperiksa di Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar pada, Senin (25/5). Selain itu, penyidik juga kembali menyita dua kardus dokumen terkait dugaan penyimpangan perjalanan dinas di Pemkot Denpasar.

Dua pejabat teknis Setwan ini diperiksa pada, Senin (25/5) pagi oleh beberapa penyidik Kejari Denpasar. Dalam pemeriksaan tersebut, kedua saksi, yaitu Made Patra dan Gede Wira membawa dua kardus data dan dokumen terkait proses teknis pelaksanaan Perdin tahun 2013 yang lalu, dari proses penunjukan travel yang jadi rekanan, sampai rekap laporan penggunaan anggaran.

"Selain memeriksa dua pejabat teknis ini, kami juga dapat dua kardus data dan dokumen terkait perjalanan dinas di Setwan," jelas Kasi Intel Kejari Denpasar, Syahrir Sagir. Dijelaskannya, data yang diserahkan ini sendiri juga menyangkut besaran anggaran yang digunakan dalam perjalanan dinas.

Selain perjalanan dinas lokal ke beberapa daerah juga ada data perjalanan dinas ke luar negeri yang dilakukan anggota DPRD Kota Denpasar. Sementara untuk mendalami pemanfaatan anggaran APBD yang digunakan Perdin oleh anggota DPRD, hari ini Selasa (26/5) akan dipanggil pejabat dari bagian keuangan Setwan.

Sebelumnya, penyidik sudah sempat menyita empat kardus dokumen dari Bagian Hukum Pemkot Denpasar dan satu kardus dokumen perjalanan dinas dari Sekwan DPRD Kota Denpasar. Dokumen ini sendiri terkait hasil audit BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) Wilayah Bali dan dokumen lainnya terkait perjalanan dinas tahun 2013.

Dalam kasus ini penyidik meneliti berkas-berkas soal perjalanan dinas yang dilakukan SKPD Pemkot Denpasar dan perjalanan dinas anggota DPRD Kota Denpasar pada 2013 lalu.

Pemeriksaan ini berdasarkan temuan BPKP terkait perjalanan dinas tidak wajar yang mencapai Rp 500 juta. Nah, dari temuan BPKP Rp 500 juta terkait perjalanan dinas yang tidak wajar ini memang sudah dikembalikan semuanya. Yang paling banyak mengembalikan yaitu Sekwan DPRD Kota Denpasar yang mencapai Rp 250 juta. Sisanya dikembalikan SKPD lainnya di Pemkot Denpasar.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar juga telah menaikkan status dugaan korupsi perjalanan dinas di Pemkot Denpasar dari Puldata (pengumpulan data) dan Pulbaket (pengumpulan bahan dan keterangan) menjadi penyelidikan. Dengan demikian, penyidik memastikan ada indikasi melawan hukum dalam kasus tersebut. **rez**

Edisi : Selasa, 26 Mei 2015

Hal : 5

HARIAN UMUM NusaBali

Pengelolaan Aset Provinsi Dinilai Tak Maksimal

NEGARA, NusaBali

Pansus Aset DPRD Bali menilai pengelolaan aset Pemprov Bali untuk Kabupaten/Kota di Bali, termasuk Jembrana dinilai belum berikan kontribusi maksimal. Dari total 131 bidang tanah yang telah dikeluarkan Surat Izin Mengelolanya (SIM) dengan luas mencapai ratusan hektare, baru berikan kontribusi sebesar Rp 7 juta per tahun.

Ketua Pansus Aset DPRD Bali, I Wayan Gunawan, saat bertemu Pemkab Jembrana, Senin (25/5) berharap ada evaluasi sebab dari ratusan bidang tanah yang dikelola belum ada capaian maksimal. Gunawan menyebut tidak relevan antara kontribusi yang dihasilkan dengan nilai aset yang dikelola. Dikatakan, selama ini pengelola tak mau bayar kontribusi, meskipun nilanya tidak seberapa, karena alasan telah membayar pajak. Belum lagi mengenai aset lahan yang belum dimanfaatkan. Hal inilah yang diakui masih ditelusurinya, sehingga ke depan tidak ada aset yang terbengkalai.

Setelah jelas terdata, akan dibarengi dengan pembenahan regulasi. Termasuk kriteria warga yang diberikan untuk mengelola. "Untuk itu, kita masih perlu kordinasi lagi, mana aset yang sudah bertuan rumah dan mana yang belum ada tuan rumahnya," kata Gunawan. Sementara Setda Jembrana, Gede Gunadnya, bersama Asisten I Setda Jembrana, I Made Sudiada, didampingi Kabid Non Pajak Dispenda Jembrana, Oka Nadiani, seusai pertemuan mengakui jika acuan tarif yang diberlakukan selama ini, nilainya kecil. Tarifnya mengacu pada Pergub Bali Nomor 41 tahun 2012, tentang perubahan atas Perda Nomor 3 tahun 2011, tentang retribusi jasa usaha. Dimana diatur, ada kelas lahan-lahannya.

Ketika lahan sawah dikenakan Rp 45 per meter persegi. Sedangkan lahan perkebunan dikenakan Rp 10 per meter persegi. Kemudian dari retribusi yang didapat, ada sistem *sharing*, dimana 40 persen masuk ke kas daerah, dan 60 persen ke provinsi. "Itu aturannya sudah seperti itu. Kalau kita naikkan, kan kita salah. Kemudian di Jembrana semuanya tanah tegalan (perkebunan), dan kena yang Rp 10 per meter persegi per tahun. Ini juga baru mulai diterapkan tahun 2013," katanya. Mengenai penataan aset, Pemkab Jembrana mengaku masih melakukan penataan. Kemudian ada juga beberapa aset milik Pemprov yang telah diusulkan dikelola Pemkab. Tercatat tahun 2014, ada 17 lokasi tanah milik Pemprov yang diminta, sementara batu disetujui 9. **od**

• NUSABALI/IB DIWANGKARA

PERTEMUAN Pansus Aset DPRD Bali dengan Pemkab Jembrana di ruang pertemuan lantai tiga Kantor Bupati Jembrana, Senin (25/5).

Edisi : Selasa, 26 Mei 2015

Hal : 7

HARIAN UMUM NusaBali

Tender Ulang Rumah Sakit Internasional Provinsi Bali

Pastika Tengarai Ada yang 'Bermain'

Awalnya pembangunan RSI terkenala IMB. Kini tendernya diulang karena prosesnya dinilai tidak transparan.

DENPASAR, NusaBali

Pembangunan Rumah Sakit Internasional (RSI) Provinsi Bali dipastikan dilakukan tender ulang. Gubernur Made Mangku Pastika menengarai ada yang tidak transparan dalam proses tendernya. Pemprov Bali pun menunjuk dua instansi yakni Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum untuk menggarap RSI Bali.

Hal itu diungkapkan Gubernur Made Mangku Pastika di pressroom Kantor Gubernur Niti Mandala Denpasar, Senin (25/5) siang. Pastika didampingi Kepala Biro Humas Dewa Gede Mahendra mengatakan, pihak Pemprov Bali melakukan tender ulang karena ada yang main-main dalam proses trender. "Kita putuskan tender ulang itu. Karena ada rekanan yang main-main. *Nggak* serius," ujar Pastika.

Main-main *gimana*? "Ya main-main, makanya (tendernya) diulang. Tidak transparan prosesnya. Kita ingin RSI dibangun dengan proses yang transparan dan pembangunannya berkualitas. Tidak apa-apa mengulang tender, yang penting transparan. *Lagian* itu *kan* dananya multiyears. Sekarang sedang proses itu di Unit Pengadaan Barang dan Jasa," imbuh Pastika.

Pastika mengatakan optimistis pembangunan RSI bisa secepatnya terwujud. Tetapi kapan akan dimulai pembangunannya secara fisik, dikatakan secepatnya. "Ya kita harapkan secepatnya lah," tegasnya.

Pastika menyebutkan pembangunan RSI juga sempat terkendala masalah izin mendirikan bangunan (IMB) yang terlambat keluar dari Pemkot Denpasar. Namun IMB tersebut kelar dan selesai dengan Nomor IMB 02/1103/3120/DPS/BPPTSP.PM/2013. Sehingga proses pembangunan fisik bisa dimulai. "Sekarang hanya masalah tender saja. Dulu gagal karena IMB-nya tidak keluar-keluar," ujar mantan Kapolda Bali ini.

Pembangunan RSI yang diwacanakan bernama RSI Bali Mandara Provinsi Bali ini kini ditangani oleh dua instansi. Untuk pengadaan alat kesehatan (alkes) ditunjuk Dinas Kesehatan. Untuk pengadaan fisik berupa gedung ditunjuk Dinas Pekerjaan Umum. "Karena urusan gedung itu Dinas PU yang membidangi. Mereka yang tahu masalah struktur bangunan. Dinas Kesehatan yang urusan alat kesehatan dan tenaga medisnya nanti," tegas pria asal Desa Sanggalangit, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, ini.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali dr Ketut Suarjaya secara terpisah mengatakan pembangunan RSI direncanakan dianggarkan dengan APBD Provinsi Bali sebesar Rp 200 miliar, dengan sistem multiyears. Lokasi RSI rencananya di Jalan Bypass Ngurah Rai Sanur, Denpasar Selatan. "Dibangun di atas tanah yang merupakan aset Pemprov Bali seluas 2,9 hektare," ujar Suarjaya.

Rumah sakit yang direncanakan memiliki fasilitas 200 ruang rawat inap ini nantinya 20 persen melayani Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM). "Meskipun namanya RSI, kita tetap menyiapkan untuk layanan JKBM sekitar 20-25 persen," imbuh Suarjaya. **nat**

Edisi : Selasa, 26 Mei 2015

Hal : 2